

---

---

## MENINGKRIKSI PEMBANGUNAN PERTAMBANGAN DI FLORES DARI PERSPEKTIF ETIKA PEMBANGUNAN PETER L. BERGER

**Adrianus Yoni Valexsta<sup>1\*</sup>, Antonius Satang<sup>2</sup>, Bernadino Dadu Open<sup>3</sup>, Farelus  
Yugar<sup>4\*</sup>**

<sup>1, 2, 3, 4</sup>Filsafat: Institute Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, Maumere, Indonesia  
\*e-mail: [adrianusyonivalexsta@gmail.com](mailto:adrianusyonivalexsta@gmail.com)

### Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis pembangunan pertambangan di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, dengan menggunakan perspektif etika pembangunan Peter L. Berger. Pembangunan pertambangan di wilayah ini telah menimbulkan berbagai dampak negatif, baik bagi masyarakat lokal maupun lingkungan hidup. Aktivitas pertambangan menyebabkan pencemaran tanah, hutan, air, dan udara, serta menimbulkan kerusakan pada properti pribadi masyarakat, seperti rumah dan lahan perkebunan. Akibatnya, sektor pertanian yang menjadi salah satu penopang utama perekonomian masyarakat lokal mengalami penurunan produktivitas. Dalam konteks ini, etika pembangunan Peter L. Berger menjadi relevan sebagai kerangka kritis terhadap praktik pembangunan yang mengabaikan dimensi kemanusiaan. Berger secara tegas mengkritik utopia pertumbuhan ekonomi yang dikembangkan oleh ideologi kapitalis maupun sosialis, dan menawarkan konsep pembangunan yang menekankan pertimbangan atas biaya manusiawi serta upaya mengurangi penderitaan sosial. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan, yakni dengan mengkaji berbagai literatur yang relevan untuk menganalisis persoalan pembangunan pertambangan di Pulau Flores melalui konsep etika pembangunan Peter L. Berger.

**Kata kunci:** pembangunan pertambangan, hak asasi manusia, lingkungan hidup, etika pembangunan Peter L. Berger

### Abstract

*This article aims to critically examine mining development on Flores Island, East Nusa Tenggara, using Peter L. Berger's development ethics perspective. Mining activities in this region have generated various negative impacts on both local communities and the environment. These activities have caused pollution of soil, forests, water, and air, as well as damage to community-owned property such as houses and plantation land. As a result, the agricultural sector – one of the main pillars of the local economy – has experienced a decline in productivity. In this context, Peter L. Berger's development ethics is relevant as a critical framework for assessing development practices that neglect the human dimension.*

*Berger firmly criticizes the utopia of economic growth promoted by both capitalist and socialist ideologies and proposes a concept of development that emphasizes consideration of human costs and efforts to reduce social suffering. This study employs a qualitative method with a literature review approach, examining relevant scholarly works to analyze the issue of mining development on Flores Island through the lens of Peter L. Berger's development ethics.*

**Key words:** *Mining development, human rights, environment, Peter L. Berger's development ethic*

## PENDAHULUAN

Diskursus tentang pembangunan menjadi isu yang tak kunjung usai dalam kehidupan masyarakat Indonesia secara umum, khususnya masyarakat Flores. Topik seputar pembangunan selalu menjadi isu yang aktual dalam perbincangan dan perdebatan masyarakat luas. Hal tersebut tidak terlepas dari dampak signifikan pembangunan itu sendiri bagi kehidupan masyarakat, di mana dampaknya tidak selalu membawa keuntungan tetapi juga turut membawa malapetaka bagi masyarakat di sekitar pembangunan atau di seluruh daerah di mana pembangunan dioperasikan. Pembangunan seringkali tidak ramah lingkungan yang menyebabkan deforestasi dan degradasi lingkungan. Hal tersebut turut menyebabkan terjadinya bencana alam seperti, tanah longsor, banjir, dan bencana lainnya.

Pembangunan tidak selamanya menyejahterahkan manusia. Hal tersebut ditegaskan oleh Benny Denar yang menjelaskan bahwa pembangunan tidak membawa manfaat secara merata bagi semua orang. Di satu sisi, pembangunan memang mendatangkan kesejahteraan dan kekayaan bagi sekelompok orang tertentu (korporasi, kaum kapital, dan lainnya), di sisi lain pembangunan tidak hanya gagal mendatangkan kesejahteraan tetapi juga turut membawa bias destruktif yang membuat masyarakat semakin miskin dan menderita serta mengeksploitasi alam (Denar, 2015). Dalam banyak kasus, pembangunan justru membuat Masyarakat semakin menderita dan menyebabkan degradasi lingkungan yang memicu terjadinya bencana alam. Dalam hal ini, kita tidak dapat menafikan bahwa salah satu penyebab terjadinya bencana alam di pulau Sumatra pada akhir tahun 2025 adalah karena pembangunan industri ekstraktif.

Pulau Sumatra dikenal sebagai salah satu wilayah pertambangan utama di Indonesia karena kekayaannya akan sumber daya mineral, seperti batu bara, emas, dan berbagai mineral lainnya. Kekayaan alam ini menjadikan daerah Sumatra sebagai lahan subur bagi korporasi untuk mengembangkan industri ekstraktif. Berdasarkan data yang diperoleh, memperlihatkan bahwa terdapat hampir 2.000 izin usaha pertambangan di

wilayah Sumatra dengan total luas konsensi mencapai 2.458.469,09 hektare. Luasan dan sebaran konsesi tersebut telah menyebabkan alih fungsi jutaan hektare jaringan hutan, kebun rakyat, dan lahan basah yang berperan sebagai kawasan penyangga air menjadi area galian, infrastruktur pertambangan, serta jalur angkut. Ironisnya, sebagian dari izin-izin tersebut berada di wilayah yang tergolong rawan bencana (JATAM, 2025). Hal inilah yang menjadi salah satu faktor terjadinya bencana banjir dan longsor yang menelan banyak korban jiwa di daerah Sumatra. Artinya, bencana tersebut tidak bisa dijelaskan hanya dengan narasi cuaca ekstrem semata, melainkan harus dibaca sebagai akibat langsung dari rusaknya ekosistem hulu dan daerah aliran sungai oleh industri ekstraktif.

Berkaca pada kenyataan tersebut, penulis dalam tulisan ini mengangkat persoalan pembangunan pertambangan di Pulau Flores yang memiliki karakteristik permasalahan serupa dengan yang terjadi di Sumatra. Pulau Flores -dari ujung barat hingga ujung timur- saat ini telah menjadi lokasi aktivitas sejumlah korporasi yang melakukan eksploitasi sumber daya alam. Kehadiran korporasi pertambangan tersebut menimbulkan berbagai dampak negatif, baik bagi masyarakat lokal maupun terhadap kelestarian lingkungan hidup. Sejumlah masyarakat mengaku mengalami kerugian akibat aktivitas perusahaan-perusahaan tambang, termasuk alih fungsi dan perusakan kawasan hutan yang dikorbankan untuk kepentingan pembangunan pertambangan. Kondisi ini menjadi semakin memprihatinkan mengingat Pulau Flores merupakan wilayah yang rawan bencana, khususnya pada musim hujan, karena tingginya curah hujan, kondisi geografis, serta struktur tanah yang rentan, yang kerap memicu terjadinya banjir dan tanah longsor.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pembangunan tidak selalu berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam banyak kasus, pembangunan justru lebih menguntungkan segelintir orang atau kelompok, sementara masyarakat lokal mengalami marginalisasi dan lingkungan hidup direduksi menjadi objek eksploitasi. Oleh karena itu, tindakan perlawanan dan penolakan terhadap suatu kebijakan merupakan sebuah bentuk tindakan kritis terhadap praktik pembangunan yang dinilai bertentangan dengan cita-cita keadilan sosial dan keberlanjutan. Pertanyaan mendasar yang diangkat penulis dalam tulisan ini yakni, untuk siapakah pembangunan dilakukan? Bukankah pembangunan diadakan untuk mengurangi penderitaan manusia? Lalu, mengapa pembangunan selalu mengorbankan manusia? Artikel ini hendak memproposalkan suatu upaya kritis untuk menolak dan

melawan semua usaha yang dilakukan kaum elit yang berpotensi merusak alam serta mengabaikan hak-hak masyarakat di NTT, khususnya di Flores.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam proses penyelesaian tulisan ini, penulis sepenuhnya menggunakan metode kajian kepustakaan (*library research*), dengan pendekatan studi khusus. Fokus studi ini secara spesifik tertuju pada persoalan pembangunan tambang yang masif dijalankan di pulau Flores. Dalam metode ini, penulis berusaha mencari dan meramu berbagai buku, literatur, serta artikel ilmiah yang mempunyai hubungan erat dengan judul atau tema yang dialami oleh penulis. Selain itu, untuk melengkapi data-data dan sekaligus sebagai sumber informasi yang aktual demi kelancaran proses penulisan ini, penulis juga menggunakan sumber lain yang mutakhir dewasa ini yaitu internet.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Potret Pembangunan Pertambangan di Flores**

Pembangunan pada dasarnya dilakukan untuk tujuan mulia yakni keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. Hal itu ditegaskan dalam UUD 1945 perihal tujuan pembangunan yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan tanah air Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial serta mewujudkan cita-cita nasional. Sehingga demi tujuan tersebut, pemerintah terus mendorong pembangunan di setiap daerah dengan dalih untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan daya saing nasional, mendorong pertumbuhan ekonomi, mempercepat pemerataan pembangunan, dan menyejahterahkan seluruh rakyat. Tujuan tersebut menjadi motif pembangunan yang gencar dijalankan oleh pemerintah di setiap wilayah. Namun, apa jadinya jika pembangunan yang diadakan malah salah kaprah dan justru menyusahkan hidup masyarakat. Kenyataan yang tidak bisa disangkal bahwa pembangunan justru membuat manusia semakin menderita, miskin, tersingkirkan dan alam dijadikan objek eksploitasi. Realitas tersebut terbukti dalam pembangunan pertambangan di daerah Flores.

Pembangunan di Flores selalu menjadi isu aktual dalam perbincangan seluruh masyarakat, khususnya masyarakat di daerah Flores. Hangatnya isu pembangunan dalam kehidupan masyarakat tidak terlepas dari dampak pembangunan yang sering kali mengorbankan hak asasi manusia dan alam. Salah satu contoh kongkrit yang terjadi adalah pembangunan pariwisata super premium di Labuan Bajo yang mengorbankan

hutan seluas 400 hektar untuk dijadikan kawasan bisnis pariwisata (Joan Damaiko Udu, 2021) dan banyak tanah milik masyarakat lokal dirampas dengan alasan pembangunan pariwisata premium. Selain pembangunan pariwisata, banyak pembangunan lainnya yang telah mengorbankan banyak pihak khususnya masyarakat lokal dan mengorbankan banyak lahan hutan. Salah satunya adalah pembangunan pertambangan yang menjamur di pulau Flores, mulai dari ujung barat yaitu Manggarai Barat hingga ujung timur Lembata dan sekitarnya.

Pulau Flores dengan luas 19.572,10 km<sup>2</sup> atau sekitar 41, 30% dari total luas daratan provinsi NTT (Jebadu, 2019) memiliki jumlah penduduk sekitar 2,34 juta jiwa pada 2025 atau sekitar 40,78% dari jumlah seluruh penduduk NTT (Sanima, 2025). Dari jumlah tersebut, sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian. Di tiga kabupaten di Flores bagian barat- Manggarai Barat, Manggarai, dan Manggarai Timur- misalnya, sektor pertanian sendiri menyumbang 50% dari ekonomi wilayah ini. Namun, ironisnya dalam 15 tahun terakhir sekitar 21. 392 hektar tanah perkebunan milik masyarakat hilang akibat industri ekstraktif (Jebadu, 2019). Industri ekstraktif mulai beroperasi dan menjamur di Flores sejak diberlakukannya kebijakan desentralisasi otonomi daerah tahun 1999 yang membuka ruang bagi perusahaan-perusahaan pertambangan baik nasional maupun internasional untuk mengeksploitasi sumber daya alam yang ada di Flores. Pada tahun 2004, pemerintah daerah secara intensif mulai menerbitkan izin usaha pertambangan dengan beragam jenis dan dalam jumlah yang sangat banyak. kondisi ini menyebabkan perusahaan-perusahaan pertambangan mulai menjamur di pulau Flores. Ekspansi sektor pertambangan tersebut tidak terlepas dari campur tangan para politisi dan pemerintah daerah yang mendorong perusahaan-perusahaan (baik nasional maupun internasional) pertambangan untuk mengeksploitasi sumber kekayaan alam yang ada di Flores. Tindakan eksploitasi tersebut terlihat dari keberadaan beragam jenis industri pertambangan (seperti mineral, panas bumi dan industri ekstraktif lainnya) yang tersebar di berbagai wilayah pulau Flores (Harahap et al., 2015).

Kekayaan sumber daya alam yang ada di pulau Flores menarik korporasi-korporasi untuk berinvestasi di sektor pertambangan. Salah satu sumber daya yang sangat besar/banyak adalah sumber daya energi panas bumi (geothermal). Di tengah krisis sumber daya energi fosil saat ini, sumber daya energi panas bumi (geothermal) yang ada di Flores dinilai sebagai solusi energi bersih dan terbarukan untuk ketahanan energi nasional (Hakim et al., 2022). Sehingga pada 19 Juni 2017, melalui Keputusan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 2268 K/30/MEM/2017,

pemerintah menetapkan pulau Flores sebagai pulau geotermal. Terdapat sekitar 16 titik yang berpotensi sebagai sumber energi panas bumi. Lewat penetapan ini, proyek geotermal akan dijalankan oleh PT. PLN dan langsung dibawah oleh Kementerian ESDM (Tanggung & Lajar, 2024). Akan tetapi, penetapan pulau Flores sebagai pulau panas bumi ini mendapat banyak penolakan dari masyarakat lokal, khususnya masyarakat yang merasakan dampak langsung dari pembangunan tambang geothermal tersebut seperti, penolakan yang dilakukan oleh masyarakat Poco Leok di kabupaten Manggarai, Masyarakat Wae Sano di kabupaten Manggarai Barat, dan penolakan yang dilakukan oleh Masyarakat desa Ratogesa, Kabupaten Ngada (Albab, 2023). Penolakan tersebut bukan tanpa alasan, tetapi karena pertambangan geotermal yang tidak berkelanjutan dan tidak ramah lingkungan serta menyebabkan deforestasi dan degradasi lingkungan. Banyak masyarakat yang menganggap bahwa pembangunan tambang geothermal merupakan bentuk tindakan eksploitasi alam yang dapat memberi dampak negatif bagi masyarakat lokal dan menyebabkan kerusakan alam. Menurut beberapa sumber, menjelaskan pemanfaatan panas bumi sebagai energi alternatif pengganti energi fosil telah membawa dampak negatif bagi kehidupan masyarakat dan alam. Hal itu dirasakan oleh masyarakat lokal yang berada di sekitar tambang, misalnya yang telah terjadi di beberapa desa di Mataloko. Di mana tanah (lahan perkebunan masyarakat), hutan, dan udara menjadi tercemar karena aktivitas penambangan. Banyak persawahan milik warga menjadi korban ketiadaan air dan berbagai tanaman warga mengalami penurunan produktifitas dan menjadi kering. Banyak bekas-bekas lubang proyek yang gagal kini terus mengeluarkan bunyi menderu, semburan lumpur dan asap yang mengepul yang bersifat korosif terhadap seng dan atap rumah warga serta menyebabkan pencemaran udara yang dapat mengakibatkan peningkatan kasus infeksi pernafasan akut (ISPA) (Susabun & Adir, 2023). Dampak-dampak negatif inilah yang membuat proyek ini menuai pro-kontra hingga berujung pada konflik sosial. Melihat kenyataan tersebut, diperlukan upaya untuk mengatasi dampak-dampak negatif yang ditimbulkan oleh proyek tambang tersebut. Sebab realitas yang terjadi menunjukkan bahwa pembangunan tambang di Flores bertolak belakang dengan tujuan pembangunan yang termuat dalam UUD 1945, yakni menyejahterakan seluruh masyarakat. Tujuan tersebut sejalan dengan pandangan Peter L. Berger yang menegaskan bahwa pembangunan merupakan usaha untuk meniadakan penderitaan.

## Konsep Pembangunan dalam Perspektif Peter L. Berger

Ada banyak pemikir yang mencoba merefleksikan terkait persoalan pembangunan, salah satunya ialah Peter L. Berger. Berger adalah seorang sosiolog kontemporer Amerika yang lahir di Vienna, Austria pada 17 Maret 1929 dan wafat pada 27 Juni 2017 di Brookline, Massachusetts. Setelah menyelesaikan pendidikan menengah di Inggris dan bermigrasi ke Amerika Serikat pasca Perang Dunia II, Berger menempuh pendidikan tinggi hingga meraih gelar BA dari Wagner College, serta MA dan Ph.D dari New School for Social Research dengan disertasi berjudul “*A Sociology of the Bahai Movement.*”. Ia berkarier sebagai akademisi dengan mengajar di berbagai universitas ternama, antara lain University of North Carolina, Hartford Theological Seminary, Rutgers University, dan Boston University. Ragam pengalaman akademik dan sosial yang dilaluinya membentuk Berger sebagai salah satu sosiolog dengan pemikiran yang kritis dan reflektif. Semasa hidupnya, Berger telah menghasilkan banyak karya. Salah satu karya Peter L. Berger yang sangat penting adalah bukunya yang berjudul, “*pyramida of sacrifice (1976)*” (*Piramida Kurban Manusia: Etika Politik dan Perubahan Sosial*). Buku ini merupakan respons kritis terhadap kapitalisme dan sosialisme, khususnya terkait mitos pertumbuhan dan revolusi yang dikandung oleh kedua sistem tersebut.

## Kritik Terhadap Kapitalisme

Menurut Berger, konsep pembangunan dalam kapitalisme pada dasarnya merupakan proyeksi universal dari *American Dream*, yakni gambaran tentang kemakmuran ekonomi yang berjalan seiring dengan demokrasi politik dalam masyarakat kelas yang dinamis. Oleh karena itu, para pemimpin di negara-negara Dunia Ketiga yang menganut model pembangunan ini kerap menjanjikan kesejahteraan material dan kebebasan politik kepada rakyatnya. Namun, Berger menilai bahwa anggapan pembangunan kapitalis di Dunia Ketiga mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat hanyalah sebuah mitos (Denar, 2019).

Berger menegaskan bahwa impian kemajuan yang dijanjikan oleh kapitalisme merupakan sebuah mitos. Menurutnya, esensi dari mitos pertumbuhan kapitalisme terletak pada apa yang ia sebut sebagai pemujaan barang (*cargo cult*), yaitu keyakinan bahwa seluruh anugerah modernitas akan datang secara otomatis dan tersedia secara melimpah bagi semua orang (Berger, 1982). Kapitalisme memang menjanjikan perubahan dan kemajuan di masa depan, namun cita-cita tersebut sering kali menuntut pengorbanan biaya-biaya kemanusiaan yang besar pada masa kini. Bahaya utama dari

mitos pertumbuhan dalam kapitalisme terletak pada kebijakan politik yang membenarkan penderitaan dan kelaparan saat ini demi janji kemakmuran di masa depan. Ini memunculkan pertanyaan serius, apakah pertumbuhan tanpa batas merupakan tujuan yang berguna, menurut ukuran ekonomi sekalipun? Atau, dapatkah ekonomi berkembang tanpa batas jika itu dianggap sebagai sistem yang terlepas dari bagian-bagian lain dalam kehidupan masyarakat, misalnya biaya ekologis, sosial, dan budaya? Bagi Berger, pertumbuhan ekonomi yang mengabaikan aspek-aspek lain dari kehidupan, misalnya aspek ekologis akan mengakibatkan terkurasnya sumber daya bumi dan peracunan persediaan makanan, yang pada akhirnya mengancam keberlanjutan hidup di bumi (Fon & Kedang, 2025).

Menghadapi berbagai dampak destruktif tersebut, Berger melontarkan kritik terhadap ideologi kapitalisme dengan mengajukan dua pertanyaan fundamental, yakni siapa pihak yang memperoleh manfaat? dan siapa yang memiliki kewenangan dalam pengambilan Keputusan? Dalam menjawab pertanyaan tersebut, Berger menegaskan bahwa kecenderungan-kecenderungan dalam Dunia Ketiga memperlihatkan bahwa kaum miskin tidak mendapatkan apa pun: efek menetes ke bawah (*trickle down effect*) atau dalam rumusan yang lebih optimis pengaruh yang menyebar (*spread effect*) tidak dirasakan oleh sebagian besar masyarakat Dunia Ketiga. Di kebanyakan negara-negara Dunia Ketiga, telah ada peningkatan dalam polarisasi pendapatan dan kesejahteraan. Masyarakat kelas bawah justru semakin tidak mendapatkan apa-apa dari pertumbuhan yang terjadi (Badj, 2024). Pembangunan hanya dikontrol oleh ideologi yang bersifat subyektif, yang berhubungan dengan “si pengambil kebijakan” dan “si peraup keuntungan”. Dalam hal ini, si pengambil Keputusan adalah kaum elitis yang memiliki pengaruh dan kemampuan untuk menentukan suatu kebijakan dengan janji kemakmuran di hari esok. Kemakmuran hanya dapat diperoleh dengan menumpukan modal saat ini, atau dengan kata lain kue ekonomi semakin membesar, maka kelas bawah tidak hanya memperoleh potongan kue yang lebih besar, tetapi mereka akan jauh lebih berkecukupan, andaikata potongan yang mereka terima tetap sama besarnya (Berger, 1982).

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa bahaya mitos pertumbuhan dalam kapitalisme terletak pada kebijakan politik yang membenarkan penderitaan dan kelaparan pada masa kini demi janji kemakmuran di masa depan. Kaum kapital kerap mengambil keputusan dan merumuskan kebijakan pembangunan dengan mengabaikan kepentingan kelas-kelas bawah. Kebijakan tersebut dijalankan demi keuntungan segelintir pihak dengan dalih tercapainya kesejahteraan di kemudian hari (Daven, 2025).

Hal ini tercermin dari kenyataan bahwa kelas-kelas bawah atau kelompok masyarakat bawah memperoleh manfaat yang sangat terbatas, bahkan tidak mendapatkan apa pun, dari pembangunan yang direncanakan. Inilah cara kerja sistem kapital yang dikritik Berger. Kritik Berger terhadap model ideologi kapitalis menjadi sangat relevan dalam konteks pembangunan pertambangan di Pulau Flores, yang kerap menjanjikan kemakmuran tetapi dalam praktiknya sering mengorbankan manusia dan lingkungan. Dampak tersebut meliputi perampasan aset, pelanggaran hak asasi manusia, meningkatnya kemiskinan, serta semakin lebarnya kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin. Selain itu, pembangunan berbasis kapitalisme juga menimbulkan kerusakan lingkungan, seperti pencemaran air, udara, dan tanah, penggusuran, serta alih fungsi kawasan hutan menjadi wilayah industri ekstraktif. Keseluruhan pengorbanan tersebut dilakukan demi mitos pertumbuhan yang diagungkan oleh sistem kapitalisme.

### **Kritik Terhadap Sosialisme**

Kritik Berger terhadap sosialisme tidak terlepas dari kritiknya terhadap kapitalisme. Menurut Peter L. Berger, persoalan utama bukanlah memilih salah satu sebagai alternatif. Ideologi sosialisme mengklaim bahwa kemiskinan dan kemelaratan di negara-negara berkembang merupakan akibat dari eksploitasi oleh negara-negara maju yang menciptakan relasi ketergantungan, baik secara ekonomi maupun politik. Selain itu, sistem ekonomi pasar bebas yang dipropagandakan oleh negara-negara kapitalis turut menjadi penyebab utama kemiskinan dan kemelaratan tersebut. Karena itu, untuk keluar dari relasi ketergantungan, dirumuskan tiga langkah utama. *Pertama*, memutuskan hubungan dengan negara-negara kapitalis dan bergabung dengan blok komunis di bawah Uni Soviet. *Kedua*, menerapkan sistem ekonomi terpusat (komando) yang menempatkan negara sebagai pengendali utama kehidupan ekonomi dan sosial dengan politik sebagai panglima. *Ketiga*, melaksanakan revolusi sosialis melalui penghapusan hak milik pribadi dan kolektivisasi aset-aset privat (Konradus Budiman Nasu, 2023).

Ideologi sosialis didasarkan pada mitos revolusi, yaitu tindakan kekerasan yang menyucikan dan diamini karena dianggap dapat membawa suatu kemakmuran di masa depan. Sesuatu yang dikorbankan saat ini akan menyelamatkan nasib di masa depan. Dengan kata lain, tindakan seperti perang akan membawa suatu kemakmuran atau perubahan besar di kemudian hari (Berger, 1982). Bahaya mitos revolusi dalam sosialisme menurut Berger terletak dalam kebijakan-kebijakan politik yang menyetujui teror pada waktu sekarang demi janji suatu tatanan manusiawi di hari esok (Daven, 2025).

Berger mengemukakan dua model pembangunan sebagai tolok ukur biaya kemanusiaan, yakni pembangunan kapitalisme di Brasil dan sosialisme di Cina. Kedua model tersebut sama-sama mentolerir penderitaan generasi masa kini demi kesejahteraan generasi mendatang serta sama-sama melegitimasi penggunaan teror sebagai sarana untuk mencapai tujuan utopis. Di Cina misalnya, pada periode (1950–1955), mengalami penderitaan fisik yang signifikan seiring pelaksanaan gerakan *Land Reform* dalam konteks dominasi ideologi Maois. Kebijakan ini bertujuan menata ulang distribusi tanah dan memperoleh dukungan politik petani miskin, namun sekaligus berfungsi sebagai instrumen politik untuk menyingkirkan kelas tuan tanah dan meredam potensi konflik. Kampanye tersebut dijalankan melalui mobilisasi massa yang diarahkan oleh rezim, sehingga memicu kekerasan sistematis. Alih-alih menciptakan stabilitas, pelaksanaan *Land Reform* justru melahirkan penderitaan baru yang mengorbankan jutaan jiwa (Berger, 1982). Meskipun realitas kekejian rezim tersebut diklaim mampu mencegah kematian akibat kelaparan yang melanda pada tahun 1959, tetap muncul pertanyaan mendasar mengenai legitimasi moralnya: apakah biaya-biaya kemanusiaan yang ditimbulkan dapat dibenarkan?

Berger menegaskan bahwa muatan mitos revolusi dalam sosialisme menuntut biaya tinggi berupa penderitaan manusia, karena gerakan revolusioner cenderung melahirkan spiral kekerasan yang berkelanjutan. Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa bukan hanya revolusi yang menimbulkan biaya kemanusiaan yang besar, tetapi juga kondisi *status quo*, yang menghadirkan penderitaan melalui kelaparan, bukan melalui peluru (Konradus Budiman Nasu, 2023). Sebagian kritik Berger didasarkan pada praktik sosialisme skala besar di Cina dan Uni Soviet, tanpa menolak pentingnya pertumbuhan ekonomi. Yang ditekankan adalah perlunya membongkar mitos pertumbuhan, karena menyamakan pembangunan semata dengan pertumbuhan ekonomi tidak dapat dibenarkan. Berkaitan dengan hal ini, Berger menegaskan secara mendetail dalam tesisnya (tesis ke delapan sampai sebelas), bahwa Ideologi sosialis yang mengejar perubahan sosial melalui revolusi telah menimbulkan “biaya-biaya manusiawi” yang sangat tinggi. Perubahan sosial yang diharapkan, seperti pembagian sumber daya kehidupan secara adil, harus dievaluasi secara kritis dengan mempertimbangkan potensi biaya manusiawi yang timbul. Berger juga menekankan perlunya upaya pembongkaran mitos-mitos atau demitologisasi. Di sisi lain, kritik yang tepat terhadap penerapan ideologi sosialisme terletak pada sikap menolak setiap kebijakan politik yang membenarkan penggunaan teror demi janji tercapainya tatanan manusiawi di masa depan. Sikap kritis semacam ini merupakan upaya serius untuk menangani berbagai

persoalan global kontemporer. Penilaian kritis terhadap setiap penerapan ideologi dalam mendefinisikan realitas akan membuka jalan bagi pemahaman yang lebih menyeluruh dan baru tentang kondisi dunia kita (Berger, 1982).

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa menurut Berger yang harus diperhitungkan adalah penderitaan manusia, terutama bentuk paling ekstrem berupa kesengsaraan fisik baik akibat kelaparan, teror, maupun penyebab lain. Penderitaan atau biaya manusiawi ini harus dihindari dan tidak pernah dapat dibenarkan. Dengan demikian, jika biaya penderitaan sebagai tolok ukur utama, maka kedua model pembangunan yakni kapitalisme di Brasil maupun sosialisme di Cina—dinilai sebagai kegagalan total.

### **Dua Kriteria Etis: Perhitungan Penderitaan dan Perhitungan Penderitaan**

Berger menilai pembangunan bertujuan untuk mengatasi atau paling tidak membatasi penderitaan manusiawi dalam semua bentuk dan dimensinya. Namun, ia mengkritik mitos pertumbuhan dan revolusi yang digaungkan oleh kapitalisme dan sosialisme. Telah dikemukakan di atas, bahwa pembangunan dibawah kontrol kapitalisme dan sosialisme hanya membuat manusia semakin menderita. Kritik Berger terhadap pertumbuhan mencakup kritik terhadap para teknostruktur, perusahaan negara, pengusaha, administrator dan kaum cendekiawan sebagai pelopor yang menjunjung tinggi mitos pertumbuhan tanpa mempertimbangkan tradisi dan filsafat manusia pada Dunia Ketiga. Pembangunan kapitalisme yang identik dengan pertumbuhan ekonomi menghadirkan kepada masyarakat sebuah keadaan kemiskinan dan kelaparan. Sementara itu, model Pembangunan dibawah control sosialisme yang menawarkan revolusi akan menelan biaya-biaya yang tinggi berupa penderitaan manusia. Revolusi hampir selalu menciptakan kekacauan dengan kekerasan dalam kehidupan masyarakat (Bau, 2022). Sehingga, Berger menegaskan bahwa kedua model Pembangunan tersebut sebagai mitos yang hanya mendatangkan penderitaan dalam kehidupan manusia sebagai mana yang terjadi di Cina dan Amerika. Hal itu nyata dalam bentuk kemiskinan, ketidakadilan, penindasan, penganiayaan, peperangan, perbudakan, eksploitasi, pembantaian massal, serta polarisasi pendapatan.

Sebagai alternatif, Berger mengajukan kriteria etis yang seyogianya dipertimbangkan dalam pembuatan kebijakan politik pembangunan yaitu *calculus of pain* (perhitungan penderitaan) dan *calculus of meaning* (perhitungan makna). *Pertama*, perhitungan penderitaan (*calculus of pains*). Perhitungan penderitaan yang dimaksudkan oleh [Peter L. Berger](#) merujuk pada berbagai penderitaan fisik yang kerap

muncul akibat pembangunan seperti; kemiskinan, ketidakadilan, ketidakmerataan pendapatan, penindasan akibat pembangunan (Daven, 2025). Pembangunan memang kerap menimbulkan korban serta penderitaan fisik bagi manusia. Hal ini mencerminkan suatu kenyataan paradoksal, yakni bahwa keberhasilan pembangunan sering kali dicapai melalui proses yang tidak sepenuhnya terbebas dari penderitaan. Menurut Berger, korban manusia dalam pembangunan hanya dapat diminimalkan apabila setiap kebijakan politik pembangunan secara konsisten mempertimbangkan dampaknya terhadap penderitaan manusia. Dalam konteks inilah Berger mengajukan sejumlah pengandaian nilai sebagai landasan pembangunan. Salah satu pengandaian tersebut menegaskan bahwa kebijakan politik seharusnya menghindari tindakan-tindakan yang berpotensi menimbulkan penderitaan manusia (Badj, 2023). *Kedua*, Perhitungan makna (*calculus of meaning*) merujuk pada pertimbangan hilangnya makna atau pengetahuan masyarakat atas kearifan lokal, kebudayaan dan peradaban yang mereka miliki (Badj, 2024). Kebudayaan terbentuk melalui proses sejarah yang panjang dan memberi makna bagi kehidupan serta mengarahkan pola perilaku manusia. Oleh karena itu, kebudayaan dan tradisi bukanlah untuk dihilangkan atau dieksploitasi, melainkan untuk dilindungi dan dilestarikan. Mengabaikan tradisi dalam proses pembangunan berpotensi menimbulkan kevakuman nilai, padahal manusia memiliki hak untuk hidup dalam dunia yang sarat makna. Menghormati hak ini merupakan suatu keharusan moral bagi kebijaksanaan politik (Berger, 1982). Dengan demikian, pembangunan yang mengabaikan aspek budaya cenderung mengalami kegagalan dan memaksa manusia hidup dalam suatu dunia yang kehilangan makna.

### **Persoalan Pembangunan Pertambangan di Pulau Flores dari Perspektif Etika Politik Pembangunan Berger**

Berdasarkan uraian di atas, menurut hemat penulis, pemikiran Peter L. Berger memiliki relevansi yang kuat dengan persoalan pembangunan pertambangan (industri ekstraktif) di Pulau Flores. Oleh karena itu, pada bagian ini penulis bermaksud memaparkan relevansi pemikiran Berger terhadap praktik pembangunan yang hingga kini terus menjadi perdebatan dalam kehidupan masyarakat Flores. Pertama, Berger mengkritik mitos pertumbuhan yang digaungkan oleh kapitalisme, karena kerap kali melahirkan berbagai bencana kemanusiaan yang berskala luas. Ia tidak menolak pertumbuhan ekonomi sebagai hasil dari pembangunan, melainkan menyoroti secara kritis sisi ironis serta dampak-dampak destruktif yang menyertainya. Kritik tersebut tampak dalam realitas ketidakadilan, kesenjangan sosial, kemiskinan, kelaparan, serta

kerusakan ekologis yang ditimbulkan oleh pembangunan yang berorientasi semata-mata pada pertumbuhan ekonomi.

Pemikiran ini relevan dalam konteks pembangunan tambang di Pulau Flores. Hemat penulis, proyek pertambangan di Pulau Flores beroperasi dalam kerangka ideologi kapitalisme. Hal ini tercermin dalam optimisme pemerintah dan kelompok pemodal yang meyakini bahwa pembangunan pertambangan akan membawa kesejahteraan bagi masyarakat Flores. Pandangan semacam ini cenderung bersifat materialistis dan berfungsi sebagai mitos pembangunan. Kenyataannya, pembangunan tambang di Pulau Flores justru memperparah penderitaan masyarakat. Masyarakat semakin terdesak oleh dampak destruktif pembangunan, seperti menurunnya hasil komoditas pertanian, berkurangnya produktivitas lahan, meningkatnya risiko tanah longsor dan banjir, serta munculnya berbagai bencana ekologis lainnya. Selain itu, aktivitas pertambangan mendorong eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, pencemaran lingkungan, serta potensi meningkatnya masalah kesehatan di kalangan masyarakat setempat. Dengan demikian, pembangunan tambang di Pulau Flores yang bergerak dalam bingkai ideologi kapitalisme tidak membebaskan masyarakat dari penderitaan, melainkan justru memperdalam krisis sosial, ekologis, dan kemanusiaan yang dialami, khususnya oleh masyarakat adat.

Kedua, Berger mengkritik model pembangunan yang berada di bawah kontrol sosialisme negara yang cenderung mengandalkan instrumen kekerasan dan teror. Model pembangunan semacam ini kerap menimbulkan ketidaknyamanan, kecemasan, dan ketakutan di tengah masyarakat. Dalam konteks pembangunan tambang di Pulau Flores, terlihat adanya pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM). Masyarakat dipaksa untuk tunduk pada kebijakan sepihak pemerintah. Kondisi ini tampak jelas dalam konflik atas sumber-sumber kekayaan alam, yang ditandai oleh tindakan anarkis, represif, intimidatif, serta perampasan lahan oleh korporasi-korporasi demi kepentingan pembangunan tambang. Ironisnya, aparaturnegara—baik pemerintah, kepolisian, maupun militer—yang seharusnya berperan melindungi masyarakat justru berpihak pada korporasi dan memberikan perlindungan terhadap praktik eksploitasi sumber-sumber ekonomi masyarakat. Tindakan-tindakan tersebut tidak mencerminkan upaya untuk menyejahterakan masyarakat, melainkan semakin memperparah penderitaan, kemiskinan, dan peminggiran masyarakat Flores.

Ketiga, menurut Berger, pembangunan bertujuan sebagai suatu upaya untuk mengatasi, atau setidaknya membatasi, penderitaan manusia dalam seluruh bentuk dan dimensinya. Oleh karena itu, demi mencapai tujuan tersebut, ia mengajukan dua kriteria

etis yang perlu dipertimbangkan dalam setiap kebijakan pembangunan, yakni *calculus of pain* (perhitungan penderitaan) dan *calculus of meaning* (perhitungan makna). Dalam konteks pembangunan pertambangan di Pulau Flores, kedua kriteria etis yang ditawarkan Berger tersebut semestinya menjadi landasan dalam meninjau kembali kebijakan pembangunan tambang. Pembangunan tidak dapat direduksi semata-mata pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat serta menjamin hak dan martabat manusia. Dengan demikian, pembangunan tidak boleh semata-mata berorientasi pada perolehan keuntungan ekonomi, melainkan harus mempertimbangkan penderitaan sosial, perlindungan hak-hak masyarakat, serta nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Flores.

Tiga poin penting dalam pemikiran Berger di atas, menurut hemat penulis, sangat relevan untuk memahami persoalan pembangunan tambang di Pulau Flores. Etika politik pembangunan yang ditawarkan Berger seyogianya dijadikan sebagai landasan etis dalam mempertimbangkan setiap kebijakan pembangunan tambang di Flores. Pembangunan tidak hanya berorientasi pada kesejahteraan generasi masa depan, tetapi juga wajib mempertimbangkan kondisi dan kehidupan masyarakat pada masa kini. Sebab, dalam praktiknya, pembangunan tambang di Pulau Flores tidak hanya gagal menyejahterakan masyarakat setempat, tetapi juga menimbulkan dampak destruktif yang merusak lingkungan hidup serta menggerus nilai-nilai kearifan lokal yang seharusnya diwariskan kepada generasi mendatang.

## KESIMPULAN

Pembangunan sektor pertambangan di pulau Flores hingga saat ini masih memicu pro-kontra. Di satu sisi, para pemerintah dan kaum kapital mendorong kelanjutan pembangunan pertambangan dengan dalih untuk kesejahteraan bersama. Namun, di sisi lain sebagian besar masyarakat menolak pembangunan ini karena membawa dampak buruk bagi kehidupan mereka. Mereka menyadari bahwa motes pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran yang ditawarkan oleh kaum pemodal sering kali tidak membawa manfaat langsung bagi kehidupan mereka, bahkan berpotensi menimbulkan penderitaan serta kerugian yang signifikan, baik bagi generasi saat ini maupun bagi generasi yang akan datang. Sejalan dengan pandangan Peter L. Berger, pembangunan pertambangan di Flores harus mempertimbangkan perhitungan penderitaan (*calculus of pain*) yang mencakup penderitaan kemiskinan, ketidakadilan, wabah penyakit, kerusakan ekologis, ketidakmerataan pendapatan, dan penindasan serta perhitungan makna (*calculus of*

*meaning*) yaitu pertimbangan terhadap hilangnya makna atau pengetahuan masyarakat atas kearifan lokal, kebudayaan, dan peradaban yang mereka miliki. Pandangan Berger ini seyogianya menjadi acuan etis yang wajib dipertimbangkan dalam setiap kebijakan pembangunan.

## DAFTAR PUSTAKA

### *Artikel dalam Journal (Jurnal Primer)*

- Albab, W. U. (2023). Kajian Terhadap Pembangunan Geotermal di Pulau Flores Berdasarkan Prespektif Teori Keadilan (John Rawls). *Depositi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 1(4). <https://journal.widyakarya.ac.id/index.php/Depositi-widyakarya/article/view/1760%0Ahttps://journal.widyakarya.ac.id/index.php/Depositi-widyakarya/article/download/1760/1901>
- Badj, B. (2024). Relevansi Etika Politik Peter L. Berger Bagi Pembangunan Pariwisata di Indonesia. *Lumen Veritatis*, 15(2), 207.
- Fon, W., & Kedang, D. L. (2025). Polemik Geotermal di Poco Leok, Manggarai dari Perspektif Etika Politik Pembangunan Peter L. Berger. *Ledalogos*, 1(2), 125.
- Hakim, A. fildzah, Krismadiana, Sholihah, F., Ismawati, R., & Dwantari, N. (2022). Potensi dan Pemanfaatan Energi Panas Bumi di Indonesia. *Indonesian Journal of Conservation*, 11(2), 71–77. <https://doi.org/10.15294/ijc.v11i2.40599>
- Harahap, B. H., Abidin, H. Z., Utoyo, H., Djumhana, D., & Yuniarni, R. (2015). Prospect of Mineral Deposits in the Central Flores Island, Eastern Indonesia Prospek Cebakan Mineral Di Pulau Flores Bagian Tengah, Indonesia Timur. *Jurnal Geologi Dan Sumberdaya Mineral*, 16(1), 1–13.
- Tanggung, A., & Lajar, T. A. P. B. (2024). Bumi Sebagai “Rumah”: Kritikan Terhadap Proyek Geotermal Poco Leok dan Mataloko dalam Perspektif Ensiklik Laudato Si’. *Vox*, 01(1), 87.

### *Buku*

- Berger, P. L. (1982). *Piramida Kurban Manusia Etika Politik dan Perubahan Sosial* (A. R. Toleng (ed.)). LP3S.
- Denar, B. (2015). *Mengapa Gereja (Harus!) Tolak Tambang?* Ledalero.
- Denar, B. (2019). Sisi Antagonis Pembangunan dan Opsi Dekolonial dalam Teologi Katolik. In M. Daven & G. Kirchberger (Eds.), *Hidup Sebuah Pertanyaan Kenangan 50 Tahun STFK Ledalero* (p. 459). Ledalero.
- Jebadu, A. (2019). *Bahtera Terancam Karam*. Ledalero.

**Skripsi/Tesis**

- Bau, S. S. (2022). *Etika Politik Pembangunan Menurut Peter L. Berger*. IFTK Ledalero.
- Konradus Budiman Nasu. (2023). *Kritik Peter L. Berger Terhadap Ideologi Kapitalisme dan Sosialisme dan Konsekuensinya bagi Pemahaman yang Realistis tentang Pembangunan*. IFTK Ledalero.

**Report/Laporan**

- Daven, M. (2025). *piramida kurban manusia*.
- Naskah Online**Albab, W. U. (2023). Kajian Terhadap Pembangunan Geotermal di Pulau Flores Berdasarkan Prespektif Teori Keadilan (John Rawls). *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 1(4). <https://journal.widyakarya.ac.id/index.php/Deposisi-widyakarya/article/view/1760%0Ahttps://journal.widyakarya.ac.id/index.php/Deposisi-widyakarya/article/download/1760/1901>
- Badj, B. (2023). Konsep Pembangun Dalam Perspektif Peter L Berger. *Pos Kupang.Com*. <https://kupang.tribunnews.com/2023/02/13/Opini-Bernadus-Badj-Konsep-Pembangun-Dalam-Perspektif-Peter-L-Berger?Page=2>,
- Badj, B. (2024). Relevansi Etika Politik Peter L. Berger Bagi Pembangunan Pariwisata di Indonesia. *Lumen Veritatis*, 15(2), 207.
- Bau, S. S. (2022). *Etika Politik Pembangunan Menurut Peter L. Berger*. IFTK Ledalero.
- Berger, P. L. (1982). *Piramida Kurban Manusia Etika Politik dan Perubahan Sosial* (A. R. Toleng (ed.)). LP3S.
- Daven, M. (2025). *piramida kurban manusia*.
- Denar, B. (2015). *Mengapa Gereja (Harus!) Tolak Tambang?* Ledalero.
- Denar, B. (2019). Sisi Antagonis Pembangunan dan Opsi Dekolonial dalam Teologi Katolik. In M. Daven & G. Kirchberger (Eds.), *Hidup Sebuah Pertanyaan Kenangan 50 Tahun STFK Ledalero* (p. 459). Ledalero.
- Fon, W., & Kedang, D. L. (2025). Polemik Geotermal di Poco Leok, Manggarai dari Perspektif Etika Politik Pembangunan Peter L. Berger. *Ledalogos*, 1(2), 125.
- Hakim, A. fildzah, Krismadiana, Sholihah, F., Ismawati, R., & Dwantari, N. (2022). Potensi dan Pemanfaatan Energi Panas Bumi di Indonesia. *Indonesian Journal of Conservation*, 11(2), 71–77. <https://doi.org/10.15294/ijc.v11i2.40599>
- Harahap, B. H., Abidin, H. Z., Utoyo, H., Djumhana, D., & Yuniarni, R. (2015). Prospect of Mineral Deposits in the Central Flores Island, Eastern Indonesia Prospek Cebakan Mineral Di Pulau Flores Bagian Tengah, Indonesia Timur. *Jurnal Geologi Dan Sumberdaya Mineral*, 16(1), 1–13.
- JATAM. (2025). *Dari Hulu yang Robek ke Kampung yang Tenggelam: Banjir Sumatera*

- dan Ledakan Izin Ekstraktif*. JATAM- Jaringan Advokasi Tambang. <https://jatam.org/id/lengkap/Banjir-Sumatera-Ledakan-Izin-Ekstraktif>
- Jebadu, A. (2019). *Bahtera Terancam Karam*. Ledalero.
- Joan Damaiko Udu. (2021). *Menimbang Kembali Alih Fungsi Hutan Bowosie*. Detiknews. <https://news.detik.com/kolom/d-5758221/menimbang-kembali-alih-fungsi-hutan-bowosie>,
- Konradus Budiman Nasu. (2023). *Kritik Peter L. Berger Terhadap Ideologi Kapitalisme dan Sosialisme dan Konsekuensinya bagi Pemahaman yang Realistis tentang Pembangunan*. IFTK Ledalero.
- Sanima, O. K. (2025). *Wacana Pembentukan Provinsi Flores Menguat, Ini Potensi dan Tantangannya*. <https://www.obortimur.com/daerah/1786294379/wacana-pembentukan-provinsi-flores-menguat-ini-potensi-dan-tantangannya>
- Susabun, A., & Adir, R. (2023). *Flores Terus Tersengat Panas Bumi: Proyek Dilanjutkan Usai Gagal Berulang dan Timbulkan Bencana Lingkungan*. Flores. Co. <https://floresa.co/panas-bumi-flores/58590/2023/12/15/>
- Tanggung, A., & Lajar, T. A. P. B. (2024). Bumi Sebagai “Rumah”: Kritikan Terhadap Proyek Geotermal Poco Leok dan Mataloko dalam Perspektif Ensiklik Laudato Si’. *Vox*, 01(1), 87.